

# **REKONSTRUKSI TINDAKAN DOXING BERMUATAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Kezia Grace Harefa

Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji konstruksi tindakan doxing bermuatan seksual sebagai tindak pidana kekerasan seksual dalam sistem hukum Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi digital telah memicu munculnya Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE), salah satunya melalui modus doxing bermuatan seksual, yaitu penyebaran identitas pribadi seseorang yang disertai dengan muatan intim tanpa persetujuan. Masalah utama yang diangkat adalah belum adanya pengaturan spesifik mengenai doxing bermuatan seksual dalam regulasi nasional, serta bagaimana tindakan tersebut dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual dengan menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), UU ITE, dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS merupakan terobosan hukum, Pasal 14 yang mengatur KSBE masih memiliki celah hukum dan bersifat multitafsir, sehingga aparat penegak hukum cenderung lebih sering menggunakan UU ITE yang berorientasi pada "muatan asusila" daripada perspektif kekerasan seksual. Melalui pisau analisis teori kepastian hukum Gustav Radbruch, teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, dan teori Sobural dari J.E. Sahetapy, penelitian ini menyimpulkan perlunya kriminalisasi yang tegas dan reformulasi norma untuk menjangkau modus doxing bermuatan seksual guna memberikan efek jera bagi pelaku serta pemulihan yang komprehensif bagi korban.

Kata Kunci: Doxing Bermuatan Seksual, Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik, UU TPKS

**RECONSTRUCTION OF SEXUALLY CHARGED DOXING AS A  
CRIMINAL ACT OF SEXUAL VIOLENCE**

Kezia Grace Harefa

Magister Ilmu Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

Dr. Hwian Christianto, S.H., M.H.

***ABSTRACT***

*This study examines the construction of sexually charged doxing as a criminal act of sexual violence within the Indonesian legal system. The rapid development of digital technology has triggered the emergence of Electronic-Based Sexual Violence (EBSV), specifically through sexually charged doxing—the non-consensual dissemination of personal identity accompanied by intimate content. The primary issues addressed are the lack of specific national regulations regarding sexually charged doxing and how such actions can be constructed as sexual violence crimes while ensuring legal certainty and victim protection. The research employs a normative legal method, analyzing Law No. 12 of 2022 on the Law on the Crime of Sexual Violence (UU TPKS), the ITE Law, and the Personal Data Protection Law (UU PDP). Findings indicate that while UU TPKS is a legal breakthrough, Article 14 regarding EBSV remains ambiguous and prone to multiple interpretations, leading law enforcement to frequently apply the ITE Law, which focuses on "decency content", rather than a sexual violence perspective. Utilizing Gustav Radbruch's theory of legal certainty, Satjipto Rahardjo's theory of legal protection, and J.E. Sahetapy's Sobural theory, this study concludes there is an urgent need for explicit criminalization and normative reformulation to address sexually charged doxing, ensuring deterrence for perpetrators and comprehensive recovery for victims.*

*Keywords: Sexually Charged Doxing, Electronic-Based Sexual Violence, UU TPKS*